

Regenerasi Ulama di Era Digital: Tantangan Modernisasi Pesantren dan Optimalisasi Pendidikan Kader Ulama sebagai Solusi Berkelanjutan

Restu Fauzi¹, M.Nurul Humaidi²

¹² Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Regeneration Ulama;
Modernization Pesantren;
Pendidikan Kader Ulama;
Era Digital;
Kitab Kuning.

Article history:

Received 2026-05-20
Revised 2026-06-19
Accepted 2026-07-13

ABSTRACT

The regeneration of ulama faces significant challenges amid the modernization of pesantren and the rapid advancement of digital technology. This study analyzes the dynamics between traditional pesantren education and the Pendidikan Kader Ulama (PKU) program initiated by the Indonesian Ulama Council (MUI), with a focus on digital-era adaptations. Using a qualitative library research approach, data were drawn from the foundational 2020 study by Ependi and Penggabean, supplemented by recent scholarly sources (2021–2026), policy documents, and program reports. Findings reveal persistent issues: declining mastery of classical yellow books (kitab kuning) due to curriculum shifts (70% general knowledge), accreditation problems of PTKU programs, and the erosion of ulama authority from political involvement and the rise of non-formal preachers. However, digital tools offer opportunities for hybrid learning, wider dissemination of kitab kuning interpretations, and enhanced cadre recruitment. This research proposes an optimization framework integrating digital platforms while preserving traditional values. The novelty lies in bridging historical analysis with contemporary digital solutions for sustainable ulama regeneration in Indonesia. Implications include policy recommendations for MUI, Kemenag, and pesantren leaders to strengthen formal recognition and digital integration.

This is an open access article under the CC BY SA license.



Corresponding Author:

Restu Fauzi
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; Fauzi.restu20@gmail.com

1. INTRODUCTION

Umat Islam meyakini bahwa keberlangsungan dan kemurnian ajaran agama sangat bergantung pada kehadiran ulama sebagai pewaris para nabi. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu (mu'allim), tetapi juga sebagai teladan moral, pemimpin spiritual, dan penjaga ortodoksi keagamaan di tengah masyarakat (Wajdi, Lubis, & Siregar, 2019; Zuhdi, 2026). Secara historis, lembaga pendidikan

Islam, khususnya pesantren, telah menjadi center of excellence dalam melahirkan ulama-ulama kharismatik yang berpengaruh luas di Nusantara (Dhofier, 1982; Ependi & Penggabean, 2020).

Memasuki abad ke-21, peran dan regenerasi ulama mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Kemajuan teknologi digital, modernisasi, globalisasi, serta perubahan sosial-budaya yang cepat telah mengubah lanskap keberagamaan masyarakat Indonesia. Fenomena kelangkaan ulama sejati (true ulama) semakin terasa, di mana banyak tokoh agama yang muncul di ruang publik lebih didominasi oleh figur dengan latar belakang pendidikan non-formal atau popularitas media sosial, sementara ulama tradisional yang memiliki kedalaman ilmu dan akhlak mulia semakin berkurang tanpa regenerasi yang memadai (Almas, Hilmy, & Erawati, 2026; Azra, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ependi dan Penggabean (2020) telah mengidentifikasi berbagai problematika yang dihadapi pesantren dalam kaitannya dengan Program Kaderisasi Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Studi tersebut membahas isu legalitas, akreditasi pendidikan non-formal, serta tantangan kelembagaan pesantren. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji dampak disruptif digital dan transformasi teknologi terhadap proses regenerasi ulama, khususnya dalam konteks Society 5.0 (Hakiki, Kamaruddin, Saleh, & Hakim, 2026; Munawaroh, Hanis, & Puspitarini, 2025). Research gap ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diteliti mengingat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dituntut mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa mengorbankan esensi tafaqquh fiddin dan penguasaan kitab kuning (Hasan, Azkiya, Aulia, & Sahara, 2025).

Salah satu contoh adaptasi yang cukup progresif adalah Pesantren Darul Ulum di Jombang, Jawa Timur. Sejak tahun 1965, pesantren ini telah mendirikan universitas, menjadikannya pionir dalam mengintegrasikan tradisi keilmuan pesantren dengan sistem pendidikan tinggi (Utsmani, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui tiga fokus utama, yaitu: (1) menganalisis berbagai tantangan modernisasi dan disruptif digital terhadap proses regenerasi ulama di pesantren; (2) mengevaluasi efektivitas Program Kaderisasi Ulama (PKU) MUI sebagai salah satu solusi kelembagaan; serta (3) merumuskan model optimalisasi regenerasi ulama berbasis digital yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan teori reproduksi ulama (ulama reproduction) di Indonesia kontemporer, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pengelola pesantren dan lembaga keagamaan dalam menyiapkan generasi ulama yang unggul di masa depan.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka dengan analisis konten. Sumber primer meliputi Ependi & Penggabean (2020) dan dokumen resmi Pesantren Darul Ulum. Studi kasus Pesantren Darul Ulum dipilih secara purposive sebagai representasi pesantren yang sukses beradaptasi dengan modernisasi.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Hasil penelitian mengungkapkan dinamika regenerasi ulama yang kompleks di tengah arus modernisasi dan disruptif digital. Analisis mendalam terhadap dokumen primer (Ependi & Penggabean, 2020) dan studi kasus Pesantren Darul Ulum menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya kelangkaan ulama, melainkan juga kualitas keulamaan di era kontemporer. Pembahasan ini dibagi menjadi empat sub tema utama untuk kejelasan analisis.

1. Fenomena Kelangkaan Ulama dan Pergeseran Peran di Era Digital

Sebagaimana diuraikan oleh Ependi dan Penggabean (2020), Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tengah mengalami krisis regenerasi ulama yang cukup mengkhawatirkan. Banyak ulama kharismatik dari generasi tua yang telah meninggal dunia tanpa diimbangi dengan lahirnya generasi penerus yang memiliki kualitas keilmuan dan keteladanan setara.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya kekosongan panutan spiritual di tengah masyarakat yang semakin kompleks.

Fenomena kelangkaan ulama sejati ini semakin diperparah oleh kemajuan teknologi digital dan disrupsi informasi yang sangat cepat. Di era media sosial, munculnya ribuan dai dan penceramah baru yang berasal dari latar belakang pendidikan non-agama formal menjadi tren yang semakin dominan. Mereka memanfaatkan platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitter/X untuk menyampaikan dakwah dengan gaya yang ringkas, menghibur, dan mudah dicerna oleh masyarakat awam. Dengan algoritma yang mendukung konten viral, dai-dai digital ini mampu meraih jutaan pengikut dalam waktu singkat (Mufarid, Monika, Ayu, Akbar, & Tauhid, 2025).

Sebaliknya, ulama tradisional yang mendalam penguasaan kitab kuning dan memiliki sanad keilmuan yang jelas cenderung kurang adaptif terhadap dinamika dunia digital. Mereka umumnya lebih nyaman dengan metode pengajaran klasik seperti halaqah dan bandongan, sehingga jangkauan pengaruhnya terbatas pada komunitas pesantren dan masyarakat sekitar. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara ulama yang populer dengan ulama yang berkualitas.

Pergeseran peran ulama dari posisi waratsatul anbiya (pewaris para nabi) menjadi lebih bersifat transaksional juga semakin terlihat nyata. Beberapa tokoh agama terlibat dalam politik praktis, menjadi konsultan bisnis, atau bahkan tersandung kasus-kasus korupsi dan skandal moral yang merusak citra keulamaan secara keseluruhan (Chalik, 2011). Hal ini secara perlahan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keulamaan tradisional.

Di era digital, otoritas ulama semakin terfragmentasi. Terdapat dua kutub yang kontras: di satu sisi muncul ulama digital yang populer, karismatik, dan mampu menguasai tren, tetapi sering kali memiliki kedalaman ilmu yang dangkal. Di sisi lain, terdapat ulama pesantren yang memiliki kedalaman keilmuan dan akhlak yang teruji, namun kurang mampu bersaing dalam perebutan perhatian di ruang maya. Fragmentasi ini tidak hanya memengaruhi pola konsumsi keagamaan masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan fondasi keislaman yang kokoh di Indonesia (Syafaah, Barizi, & Sumbulah, 2024; Wibowo & Triadi, 2025).

Lebih lanjut, algoritma media sosial yang cenderung mempromosikan konten emosional, kontroversial, dan sensasional turut memperburuk situasi. Konten keagamaan yang provokatif dan simplistik lebih mudah viral dibandingkan kajian ilmiah yang mendalam dan bernuansa. Akibatnya, masyarakat semakin terpapar pada pemahaman keagamaan yang dangkal, hitam-putih, dan rentan terhadap ekstremisme atau liberalisme berlebihan. Kondisi ini menegaskan bahwa kelangkaan ulama bukan hanya masalah jumlah, melainkan juga krisis kualitas dan otoritas di tengah banjir informasi yang tidak terfilter.

Pergeseran peran ulama dari waratsatul anbiya (pewaris nabi) menjadi lebih bersifat transaksional juga terlihat dari keterlibatan beberapa tokoh dalam politik praktis dan kasus korupsi, sebagaimana didokumentasikan dalam studi 2020. Hal ini menggerus kepercayaan masyarakat terhadap otoritas keulamaan. Di era digital, otoritas ulama semakin terfragmentasi: satu sisi ada ulama digital yang populer namun dangkal, di sisi lain ulama pesantren yang mendalam namun terbatas jangkauannya.

2. Tantangan Modernisasi Pesantren dan Reproduksi Ulama

Modernisasi pesantren yang semakin intensif pasca dikeluarkannya SKB Tiga Menteri (1975) dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 serta No. 20 Tahun 2003 telah secara fundamental mengubah lanskap pendidikan Islam di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan proporsi kurikulum 70% pengetahuan umum dan hanya 30% pendidikan agama telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap proses reproduksi ulama (Ependi & Penggabean, 2020).

Akibat kebijakan tersebut, penguasaan kitab kuning di kalangan santri menjadi semakin setengah-setengah. Banyak santri yang lebih mahir dalam mata pelajaran umum seperti Matematika, IPA, Bahasa Inggris, dan IPS, tetapi pengetahuan mereka tentang fiqh, tafsir, hadis, dan tasawuf klasik menjadi dangkal. Pesantren salaf yang semula menjadi pusat tafaquh fiddin (pendalaman agama) kini

banyak yang bertransformasi menjadi lembaga pendidikan formal dengan mendirikan madrasah, sekolah unggulan, dan bahkan universitas. Perubahan ini menyebabkan identitas pesantren sebagai “pabrik” ulama semakin terancam (Bruinessen, 2018).

Diversifikasi fungsi pesantren memang memberikan banyak manfaat. Pesantren tidak lagi hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, melainkan juga menjadi agent of change yang berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul dilema yang cukup serius. Santri saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di kelas formal madrasah atau sekolah daripada mengikuti pengajian kitab kuning di masjid atau halaqah. Waktu untuk mendalami teks-teks klasik semakin terbatas, sehingga kualitas keulamaan generasi baru menjadi semakin menurun (Fathoni & Rohim, 2019; Setiawan & Windayanti, 2025).

Lebih lanjut, tuntutan pemahaman kitab kuning yang komprehensif bukan sekadar hafalan teks, melainkan juga pemahaman konteks historis, metodologi, dan relevansinya dengan masalah kontemporer semakin mendesak di era globalisasi dan Society 5.0. Kitab kuning bukan hanya warisan masa lalu, melainkan juga sumber solusi bagi berbagai persoalan kehidupan modern seperti etika teknologi, keadilan sosial, dan lingkungan hidup. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pesantren kesulitan menyeimbangkan antara tuntutan akreditasi formal dengan pemeliharaan tradisi keilmuan Islam klasik (Salam, Suharmon, Shidqi, Yozi, & Jistito, 2025; Syu’aib & Husni, 2025).

Situasi ini menciptakan dua kutub yang saling bertentangan. Di satu sisi, pesantren yang terlalu kaku mempertahankan tradisi lama berisiko tertinggal oleh perkembangan zaman. Di sisi lain, pesantren yang terlalu agresif melakukan modernisasi berisiko kehilangan ruh keilmuan Islam yang menjadi ciri khasnya. Dilema ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam reproduksi ulama di Indonesia saat ini. Tanpa adanya strategi adaptasi yang cerdas, dikhawatirkan generasi mendatang akan kekurangan ulama yang tidak hanya menguasai agama secara mendalam, tetapi juga mampu memberikan respons yang relevan terhadap tantangan zaman (Fahmi & Firdaus, 2024).

Oleh karena itu, modernisasi pesantren harus dilakukan secara selektif dan berbasis visi yang jelas, yaitu tetap mempertahankan core keilmuan Islam sambil terus beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Studi Kasus: Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang sebagai Model Adaptasi

Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang merupakan salah satu contoh pesantren yang berhasil mempertahankan identitas keilmuan Islam klasik sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman. Berdiri pada tahun 1885 atas prakarsa KH. Tamim Irsyad, seorang ulama asal Bangkalan, Madura, pesantren ini dibangun di atas kawasan yang pada saat itu masih berupa hutan belantara di Desa Rejoso. Sejak awal pendiriannya, Darul Ulum tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, dakwah Islam, dan pemberdayaan masyarakat sekitar. Sejarah panjang yang dimiliki pesantren ini menunjukkan bahwa keberlangsungan lembaga pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan adaptasi tanpa kehilangan jati diri sebagai institusi pencetak ulama.

Pada periode awal atau periode klasik (1885–1937), sistem pendidikan yang diterapkan masih sangat bercorak tradisional. Proses pembelajaran berpusat pada hubungan langsung antara kiai dan santri melalui metode halaqah, bandongan, dan sorogan. Materi pembelajaran difokuskan pada penguasaan ilmu-ilmu keislaman klasik, seperti Al-Qur'an, hadis, fikih, ushul fikih, tauhid, nahwu, sharaf, serta tasawuf melalui kajian kitab-kitab kuning. Pada masa ini, KH. Tamim Irsyad menjalin hubungan intelektual yang kuat dengan KH. Muhammad Cholil Bangkalan, salah seorang ulama besar Nusantara yang dikenal sebagai guru para pendiri organisasi Islam besar di Indonesia. Hubungan keilmuan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kualitas pendidikan di Darul Ulum sehingga pesantren ini mampu melahirkan ulama-ulama yang memiliki kompetensi keilmuan mendalam sekaligus berakhlak mulia.

Karakteristik utama pada periode klasik adalah kuatnya proses transmisi ilmu secara langsung melalui sanad keilmuan yang bersambung kepada para ulama terdahulu. Regenerasi ulama tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga pewarisan nilai-nilai spiritual, etika, kepemimpinan, dan keteladanan hidup seorang kiai kepada para santri. Model pendidikan seperti ini memperkuat legitimasi keilmuan lulusan pesantren karena mereka memperoleh ilmu melalui jalur sanad yang jelas, suatu tradisi yang hingga kini masih menjadi ciri khas pendidikan pesantren salaf.

Memasuki periode pertengahan (1937–1958), perkembangan Darul Ulum menunjukkan perubahan orientasi yang lebih luas. Di bawah kepemimpinan KH. Romli Tamim, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga mengambil peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa revolusi fisik, banyak santri dan kiai yang terlibat dalam berbagai aktivitas perjuangan, baik melalui dukungan moral, pendidikan kebangsaan, maupun keterlibatan langsung dalam mempertahankan wilayah Indonesia dari ancaman penjajah.

Keterlibatan pesantren dalam perjuangan nasional menunjukkan bahwa fungsi ulama tidak terbatas sebagai pendidik agama, tetapi juga sebagai pemimpin sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan bangsa. Nilai-nilai nasionalisme yang dikembangkan di lingkungan pesantren berjalan seiring dengan prinsip-prinsip keislaman, sehingga melahirkan sosok ulama yang memiliki wawasan keagamaan sekaligus kesadaran kebangsaan yang kuat. Periode ini menjadi fase penting dalam pembentukan karakter ulama yang mampu menjadi agen perubahan sosial (*agent of social change*) dan perekat kehidupan masyarakat.

Transformasi terbesar Darul Ulum terjadi pada era modern, khususnya sejak tahun 1965 ketika didirikan Universitas Darul Ulum (yang kini berkembang menjadi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum/UNIPDU). Langkah ini merupakan terobosan yang sangat progresif karena pada masa tersebut belum banyak pesantren yang berani mengintegrasikan pendidikan tinggi modern ke dalam sistem pendidikan pesantren. Kehadiran universitas menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa pesantren tidak hanya bertugas mencetak ahli agama, tetapi juga menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berkontribusi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional (Setianingsih, 2017).

Menariknya, struktur awal universitas tersebut terdiri atas lima fakultas umum dan hanya satu fakultas agama Islam. Komposisi ini menunjukkan bahwa Darul Ulum memiliki visi integratif antara ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan agama tetap dijadikan sebagai fondasi utama pembentukan karakter, sedangkan ilmu-ilmu umum diposisikan sebagai sarana untuk menjawab tantangan modernisasi. Model integrasi tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi pendidikan pesantren yang kemudian banyak diikuti oleh pesantren-pesantren lain di Indonesia.

Meskipun melakukan modernisasi kelembagaan, Darul Ulum tetap mempertahankan tradisi pesantren yang menjadi identitas utamanya. Hingga saat ini, kegiatan pengajian kitab kuning, halaqah, pembelajaran sorogan, serta pendidikan Ma'had Aly tetap berjalan secara intensif sebagai wahana kaderisasi ulama. Keberadaan Ma'had Aly memiliki posisi strategis karena berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi berbasis pesantren yang secara khusus mempersiapkan calon ulama dengan kompetensi mendalam dalam bidang ilmu-ilmu syariah dan turats Islam.

Selain mempertahankan pendidikan salaf, Darul Ulum juga mengembangkan berbagai lembaga pendidikan formal yang lengkap, mulai dari taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, sekolah menengah umum, sekolah kejuruan, hingga perguruan tinggi. Integrasi berbagai jenjang pendidikan tersebut menciptakan ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan sehingga proses kaderisasi dapat dilakukan sejak usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi. Model ini memungkinkan pesantren menghasilkan lulusan dengan karakter religius sekaligus memiliki kompetensi akademik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Keberhasilan proses transformasi tersebut tidak terlepas dari sistem kepemimpinan pesantren yang mampu mengombinasikan nilai tradisional dengan tata kelola organisasi modern. Kepemimpinan tetap berada di bawah garis keturunan keluarga kiai sebagai bentuk keberlanjutan

sanad kepemimpinan dan penjagaan nilai-nilai pesantren. Namun, dalam aspek pengelolaan kelembagaan, Darul Ulum menerapkan prinsip-prinsip manajemen profesional melalui pembagian tugas yang jelas, pengelolaan administrasi yang sistematis, perencanaan strategis, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Model kepemimpinan seperti ini memperlihatkan bahwa tradisi pesantren tidak bertentangan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 dan masyarakat digital mendorong Darul Ulum untuk melakukan inovasi yang lebih luas. Memasuki dekade 2020-an, berbagai aspek pengelolaan pesantren mulai mengadopsi sistem digital. Administrasi akademik, pengelolaan keuangan, pendataan santri, hingga pelayanan informasi dilakukan melalui sistem berbasis teknologi informasi yang lebih efisien dan transparan.

Digitalisasi administrasi tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas tata kelola pesantren. Pada bidang pendidikan, Darul Ulum mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi, terutama ketika pandemi COVID-19 melanda. Pembelajaran *daring* (*online learning*) diterapkan melalui berbagai platform digital sehingga proses pendidikan tetap dapat berlangsung meskipun terdapat pembatasan aktivitas tatap muka. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pesantren memiliki kemampuan adaptif terhadap situasi krisis tanpa mengurangi kualitas pembelajaran keagamaan (Baidhowi & SEI, 2022). Setelah pandemi, model pembelajaran berkembang menjadi sistem *hybrid learning*, yaitu kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi santri maupun tenaga pendidik. Digitalisasi juga terlihat pada sistem penerimaan santri baru yang memanfaatkan pendaftaran daring, seleksi berbasis komputer, serta tes masuk secara hybrid. Inovasi ini memperluas akses calon santri dari berbagai daerah di Indonesia sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara nasional. Tingginya jumlah pendaftar setiap tahun menunjukkan bahwa modernisasi layanan pendidikan tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan pesantren, bahkan justru meningkatkan daya tarik Darul Ulum sebagai lembaga pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain pada aspek pendidikan dan administrasi, Darul Ulum juga memanfaatkan media digital sebagai sarana dakwah dan penyebaran ilmu pengetahuan. Website resmi, media sosial, kanal video, serta berbagai platform digital digunakan untuk menyampaikan kajian keislaman, informasi kegiatan pesantren, publikasi akademik, hingga layanan komunikasi dengan masyarakat. Pemanfaatan media digital ini memperluas jangkauan dakwah pesantren sehingga tidak lagi terbatas pada lingkungan internal, melainkan dapat diakses oleh masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan demikian, Pesantren Darul Ulum Rejoso dapat dipandang sebagai model adaptasi pesantren yang berhasil memadukan nilai-nilai tradisional dengan inovasi modern secara seimbang. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus menghilangkan identitas pesantren sebagai lembaga kaderisasi ulama. Sebaliknya, inovasi kelembagaan, pengembangan pendidikan formal, digitalisasi manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi justru menjadi instrumen yang memperkuat fungsi pesantren sebagai *center of excellence* dalam pendidikan Islam sekaligus agent of change dalam pembangunan masyarakat. Model Darul Ulum memberikan bukti bahwa regenerasi ulama pada era digital dapat tetap berlangsung secara efektif apabila didukung oleh sistem pendidikan yang adaptif, kepemimpinan visioner, serta komitmen kuat dalam menjaga tradisi keilmuan Islam yang autentik.

Table 1. Evolusi Model Regenerasi Ulama di Pesantren Darul Ulum

Periode	Karakteristik Utama	Kontribusi terhadap Regenerasi Ulama	Adaptasi Digital Kontemporer
Klasik (1885-1937)	Pengajian halaqah & kitab kuning	Melahirkan ulama kharismatik lokal	
Pertengahan (1937-1958)	Keterlibatan perjuangan kemerdekaan	Memperkuat peran sosial-politik ulama	
Modern (1965-sekarang)	Universitas + madrasah + Ma'had Aly	Produksi SDM handal & calon ulama formal	Hybrid learning, administrasi digital, konten dakwah online
Era Digital (2020-an)	Integrasi teknologi & manajemen modern	Rekrutmen nasional & jangkauan luas	Tes hybrid, LMS, media sosial resmi

Sumber: Diadaptasi dari Ependi & Penggabean (2020), situs resmi Ponpes Darul Ulum (2026), dan analisis penulis

4. Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebagai Solusi dan Problematikanya

Pendidikan Kader Ulama (PKU) merupakan salah satu inovasi strategis yang dikembangkan untuk menjawab tantangan regenerasi ulama di Indonesia. Program ini lahir sebagai respons terhadap semakin terbatasnya jumlah ulama yang memiliki kompetensi mendalam dalam bidang ilmu-ilmu keislaman klasik, sementara kebutuhan masyarakat terhadap figur ulama terus meningkat seiring berkembangnya persoalan sosial, keagamaan, ekonomi, hingga teknologi. Berbeda dengan pesantren yang memiliki sistem pendidikan berjenjang dan berlangsung dalam waktu relatif panjang, PKU dirancang sebagai program kaderisasi yang lebih intensif dengan fokus utama membentuk calon ulama dalam waktu yang lebih terstruktur melalui penguatan kompetensi keilmuan Islam, kepemimpinan, dan dakwah (Zulkarnain & Hasibuan, 2025).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas moral dalam kehidupan keagamaan memandang bahwa keberlanjutan dakwah Islam sangat bergantung pada tersedianya ulama yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, serta kemampuan menjawab berbagai persoalan kontemporer. Oleh karena itu, MUI menginisiasi Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) di berbagai daerah, termasuk Program Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) MUI Sumatera Utara, sebagai salah satu bentuk investasi sumber daya manusia di bidang keagamaan. Kehadiran program ini menunjukkan bahwa proses regenerasi ulama tidak lagi hanya bergantung pada lembaga pesantren tradisional, tetapi juga mulai dikembangkan melalui model pendidikan yang lebih sistematis dan terorganisasi (Alhaq & Castrawijaya, 2025)

Secara substansial, kurikulum PKU menempatkan penguasaan ilmu-ilmu keislaman klasik sebagai prioritas utama. Peserta didik secara intensif untuk memahami kitab kuning (turats) yang menjadi rujukan utama dalam tradisi keilmuan Islam. Materi pembelajaran meliputi tafsir Al-Qur'an, ilmu hadis, fikih, ushul fikih, ilmu kalam, akhlak, tasawuf, bahasa Arab, qawa'id fiqhiyyah, hingga metodologi istinbath hukum Islam (Ahmad, Mutaqin, & Supardi, 2025). Penguasaan kitab kuning dipandang sebagai fondasi utama bagi seorang ulama karena melalui literatur klasik tersebut peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap khazanah intelektual Islam yang telah berkembang selama berabad-abad.

Selain aspek akademik, PKU juga memberikan perhatian terhadap pembentukan karakter kepemimpinan ulama. Peserta tidak hanya dituntut menguasai teori keislaman, tetapi juga dibekali kemampuan berdakwah, komunikasi publik, kepemimpinan organisasi, penyelesaian konflik sosial, serta kemampuan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan umat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep ulama yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu agama

secara tekstual, tetapi juga pada kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks (Roziqin, Prasongko, & Aisyah, 2024).

Keberadaan PTKU MUI Sumatera Utara merupakan salah satu contoh implementasi program kaderisasi ulama yang cukup berkembang di Indonesia. Program ini menggunakan sistem pendidikan berbasis asrama sehingga peserta memperoleh pembinaan secara intensif, baik dalam aspek akademik maupun pembentukan karakter. Lingkungan pendidikan yang kondusif memungkinkan terjadinya proses transfer ilmu, pembiasaan ibadah, penguatan akhlak, serta pembentukan budaya intelektual yang menjadi ciri khas pendidikan ulama. Model pendidikan seperti ini memiliki kesamaan dengan sistem boarding school di pesantren, namun dengan durasi pendidikan yang lebih terfokus pada penguatan kompetensi keulamaan.

Meskipun demikian, efektivitas PKU sebagai solusi regenerasi ulama masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Salah satu persoalan utama adalah aspek legalitas kelembagaan. Berbeda dengan perguruan tinggi yang berada di bawah sistem pendidikan nasional dan memiliki mekanisme akreditasi resmi, sebagian besar program PKU masih berstatus sebagai pendidikan nonformal atau pendidikan khusus yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pendidikan tinggi nasional. Kondisi tersebut menyebabkan lulusan PKU sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pengakuan akademik maupun administratif.

Permasalahan legalitas ini berdampak langsung terhadap peluang karier para alumni. Dalam berbagai proses rekrutmen tenaga pendidik, aparatur sipil negara, dosen, maupun profesi lain yang mensyaratkan ijazah formal, lulusan PKU sering mengalami kendala karena sertifikat yang dimiliki belum memiliki kesetaraan dengan ijazah perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Akibatnya, kompetensi keilmuan yang sebenarnya sangat baik belum selalu memperoleh pengakuan secara administratif di berbagai institusi formal. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang mengurangi daya tarik program kaderisasi ulama bagi sebagian calon peserta, khususnya generasi muda yang juga mempertimbangkan prospek karier profesional.

Selain persoalan legalitas, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan. Sebagian besar penyelenggaraan PKU masih bergantung pada dukungan pemerintah daerah, bantuan lembaga keagamaan, maupun kontribusi masyarakat. Keterbatasan sumber pendanaan dapat memengaruhi kualitas sarana pembelajaran, kesejahteraan tenaga pengajar, penyediaan literatur ilmiah, hingga pengembangan teknologi pendidikan. Dalam jangka panjang, keberlanjutan program kaderisasi membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih stabil agar proses pendidikan dapat berjalan secara optimal.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan perkembangan teknologi digital. Perubahan pola belajar generasi muda menuntut lembaga pendidikan keagamaan untuk melakukan inovasi dalam metode pembelajaran. Peserta didik saat ini terbiasa mengakses informasi melalui media digital sehingga pembelajaran konvensional yang sepenuhnya berbasis tatap muka perlu dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran berbasis teknologi. Namun demikian, digitalisasi pendidikan ulama juga harus dilakukan secara selektif agar tidak mengurangi kedalaman kajian kitab kuning yang selama ini menjadi ciri utama pendidikan ulama.

Perkembangan teknologi informasi sebenarnya membuka peluang besar bagi pengembangan PKU. Platform pembelajaran daring atau Learning Management System (LMS) dapat dimanfaatkan untuk menyediakan materi kitab kuning dalam bentuk digital, video pembelajaran, forum diskusi ilmiah, latihan penerjemahan teks Arab, hingga evaluasi pembelajaran secara berkala. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan peserta mengakses materi pembelajaran secara lebih fleksibel tanpa mengurangi intensitas bimbingan dari para masyayikh atau dosen pembimbing. Digitalisasi juga dapat mendukung dokumentasi sanad keilmuan serta memperluas akses masyarakat terhadap kajian-kajian Islam yang otoritatif.

Di samping itu, teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) berpotensi dimanfaatkan sebagai media pendukung pembelajaran, misalnya untuk membantu analisis tata bahasa Arab, pencarian referensi kitab klasik, latihan penerjemahan, maupun evaluasi kemampuan membaca kitab

kuning. Meskipun demikian, penggunaan AI tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses talaqqi dan bimbingan langsung dari ulama yang merupakan inti dari tradisi transmisi ilmu dalam Islam (Azhar et al., 2025).

Dalam konteks penguatan legalitas, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun kerja sama antara PKU dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) maupun perguruan tinggi Islam swasta yang telah terakreditasi. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui program *dual degree*, rekognisi pembelajaran lampau (*Recognition of Prior Learning/RPL*), atau penyetaraan kredit akademik sehingga lulusan PKU memperoleh pengakuan akademik sekaligus tetap mempertahankan kekhasan pendidikan keulamaan. Model integrasi ini memungkinkan lulusan memiliki kompetensi keilmuan yang kuat sekaligus memperoleh legitimasi formal yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Selain itu, proses rekrutmen calon peserta juga dapat diperluas melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem pendaftaran daring, seleksi berbasis komputer, wawancara virtual, hingga program mentoring secara daring memungkinkan PKU menjangkau peserta dari berbagai wilayah Indonesia tanpa dibatasi oleh kondisi geografis. Pendekatan ini akan memperluas akses kaderisasi ulama sekaligus meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan keulamaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa PKU merupakan salah satu alternatif strategis dalam menjawab krisis regenerasi ulama di Indonesia. Program ini memiliki keunggulan dalam pembinaan ilmu-ilmu keislaman secara intensif dan pembentukan karakter kepemimpinan umat. Namun demikian, keberhasilan PKU dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara mengatasi berbagai tantangan, terutama terkait legalitas kelembagaan, akreditasi, pendanaan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, sinergi antara MUI, pemerintah, perguruan tinggi, pesantren, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi PKU sebagai model pendidikan kader ulama yang berkualitas, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di era digital.

(Ependi & Penggabean, 2020; data terkini PTKU MUI Sumut, 2024)

Tabel 2. Perbandingan Pesantren vs Pendidikan Kader Ulama

Aspek	Pesantren (contoh Darul Ulum)	PKU/PTKU MUI	Rekomendasi Optimalisasi Digital
Kurikulum	Hybrid kitab kuning + formal	Intensif kitab kuning	Platform LMS berbasis kitab kuning interaktif
Legalitas & Akreditasi	Formal (universitas)	Non-formal (tantangan utama)	Kerja sama dengan PTKIN untuk dual degree
Jangkauan & Rekrutmen	Lokal-nasional, turun-temurun	Nasional, program asrama	MOOC + AI untuk seleksi & mentoring virtual
Tantangan Utama	Pengenceran fokus agama	Akreditasi & funding	Literasi digital & konten autentik

Analisis Kritis dan Novelty

Studi kasus Darul Ulum membuktikan bahwa modernisasi tidak harus kontradiktif dengan tradisi jika dikelola dengan visi yang jelas. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi kerangka optimalisasi digital terhadap model Darul Ulum dan PKU: (1) pengembangan hybrid halaqah via aplikasi, (2) sertifikasi digital berbasis blockchain untuk kompetensi kitab kuning, dan (3) kolaborasi nasional MUI-Pesantren-PT untuk penyelesaian akreditasi. Pendekatan ini menjawab research gap dari studi 2020 dengan menawarkan solusi berkelanjutan di era Society 5.0. Implikasi praktis meliputi rekomendasi kebijakan bagi Kemenag dan MUI untuk mereplikasi model Darul Ulum secara nasional, serta pengembangan konten digital yang autentik untuk melawan banjir informasi keagamaan yang tidak berkualitas.

4. CONCLUSION

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa regenerasi ulama di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat modernisasi pesantren dan disrupsi teknologi digital. Pergeseran kurikulum yang mengutamakan pengetahuan umum telah menyebabkan melemahnya penguasaan kitab kuning di kalangan santri, sementara program Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI, meskipun menjadi solusi penting, masih terkendala status non-formal dan akreditasi yang belum memadai (Ependi & Penggabean, 2020). Studi kasus Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang membuktikan bahwa keseimbangan antara tradisi dan modernisasi dapat dicapai melalui integrasi pendidikan formal (universitas) dengan pengajian kitab kuning yang intensif, serta adaptasi digital dalam pembelajaran dan dakwah.

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa optimalisasi Pendidikan Kader Ulama berbasis teknologi digital seperti platform hybrid halaqah, Learning Management System (LMS), dan konten tafsir interaktif menjadi solusi berkelanjutan untuk memperkuat regenerasi ulama di era Society 5.0. Model Darul Ulum dapat dijadikan rujukan nasional dalam menggabungkan peran pesantren sebagai agent of change sekaligus center of excellence reproduksi ulama. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis tantangan modernisasi dan merumuskan strategi optimalisasi telah tercapai.

Penelitian ini merekomendasikan agar MUI dan Kementerian Agama segera mempercepat proses akreditasi PTKU serta mendorong kolaborasi antar-pesantren dengan perguruan tinggi Islam negeri untuk program dual-degree. Selain itu, pengembangan konten digital berbasis kitab kuning yang autentik diperlukan untuk menghadapi banjir informasi keagamaan di media sosial. Penelitian lanjutan dengan pendekatan mixed-methods pada pesantren-pesantren lain di berbagai provinsi sangat diharapkan untuk memperkaya model regenerasi ulama yang kontekstual.

REFERENCES

- Ahmad, J., Mutaqin, D. Z., & Supardi, E. (2025). *Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Jenjang Ulya*. Minhaj Pustaka.
- Alhaq, D. L., & Castrawijaya, C. (2025). Perkembangan Teknologi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(2), 877–900.
- Almas, Z., Hilmy, M., & Erawati, D. (2026). Regenerasi Kepemimpinan Patriarkal Di Pondok Pesantren Darussalam Martapura: Perspektif Otoritas Max Weber. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(3), 5823–5837.
- Azhar, M., Yolanda, D., Frananda, A., Saputra, M. R., Mulyani, R., & Nurdinah, S. (2025). Revolusi pembelajaran bahasa Arab di era digital: Analisis peran artificial intelligence dalam pengembangan kompetensi berbahasa. *Al-Ma'Lumat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 58–81.
- Azra, A. (2017). *Surau: Pendidikan Islam tradisi dalam transisi dan modernisasi*. Kencana.
- Baidhowi, M. M., & SEI, M. E. (2022). Pendampingan Digitalisasi Umkm Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Support Sistem*, 39.
- Bruinessen, M. van. (2018). The governance of Islam in two secular polities: Turkey's Diyanet and Indonesia's Ministry of Religious Affairs. *European Journal of Turkish Studies. Social Sciences on Contemporary Turkey*, (27).
- Chalik, A. (2011). *Nahdlatul ulama dan geopolitik: perubahan dan kesinambungan*. Impulse.
- Dhofier, Z. (1982). Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai. (No Title).
- Ependi, R., & Penggabean, H. S. (2020). Regenerasi Ulama: Antara Pesantren Dan Pendidikan Kader Ulama. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 45–59.
- Fahmi, A. A., & Firdaus, N. H. (2024). Pesantren Semi-Modern dalam Pusaran Modernisasi: Studi Kasus di Pondok Pesantren Condong: Semi-Modern Islamic Boarding Schools in the Vortex of Modernization: A Case Study of Condong Islamic Boarding School. *Jurnal Sejarah*, 7(1).
- Fathoni, M. A. F., & Rohim, A. N. R. (2019). Pesantren value added sebagai modal pemberdayaan

- ekonomi masyarakat Kecamatan Cibadak Lebak Banten. *Islamic Economics Journal*, 5(02), 221–249.
- Hakiki, D. Q., Kamaruddin, I., Saleh, H., & Hakim, A. (2026). Transformasi Lembaga Pendidikan Islam Indonesia di Era Artificial Intelligence (AI): Analisis Filosofis terhadap Perubahan Paradigma Pendidikan. *PARADIGMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN PENDIDIKAN*, 12(1), 349–365.
- Hasan, R. U., Azkiya, S. N., Aulia, Z. N., & Sahara, F. A. (2025). Kajian Teoritis atas Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Rekonstruksi Kurikulum Pesantren. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(3), 57–69.
- Mufarid, R., Monika, S., Ayu, S., Akbar, R., & Tauhid, I. (2025). Fiqh dalam Era Digital: Tantangan dan Respons Ulama. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 10(6), 485.
- Munawaroh, S. R., Hanis, M. R., & Puspitarini, D. (2025). Pendidikan Islam di Masa Depan: Kajian Futorologis dan Survivalitas Pendidikan Islam di Era Disrupsi. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 7(3), 157–165.
- Roziqin, M. A., Prasongko, W. A., & Aisyah, S. (2024). Pendidikan Kader Ulama (PKU) di IAIN Palangka Raya: Menyongsong Generasi Ulama Indonesia. *Edu-Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 8(2).
- Salam, M. Y., Suharmon, S., Shidqi, M. H., Yozi, S., & Jistito, D. (2025). Tradisi keilmuan pesantren melalui integrasi sorogan dan bandongan dalam pembelajaran kitab kuning di Sumatera Barat. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 27–46.
- Setianingsih, D. (2017). *Kesinambungan Dan Perubahan Lembaga Pendidikan Di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang*. Universitas Airlangga.
- Setiawan, A. H., & Windayanti, W. (2025). Pesantren dan Transformasi Sosial: Studi Kualitatif tentang Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bandar Lampung. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 7(2), 401–426.
- Syafaah, D., Barizi, A., & Sumbulah, U. (2024). From pulpit to screen: The evolution of Islamic scholars' roles in the digital age. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 19(1), 11–25.
- Syu'aib, M., & Husni, M. (2025). Kitab Kuning Fondasi Karakter Orang-Orang Pesantren. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 412–423.
- Utmani, M. M. (2024). Pengembangan Mutu Perguruan Tinggi Islam Berbasis Pesantren (Kebijakan Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Islam dalam Naungan Pesantren di Kabupaten Jombang). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(4), 281–294.
- Wajdi, F., Lubis, Z., & Siregar, K. I. (2019). Transformative Education through Sufism based character education in Indonesian pesantren. *1st International Conference on Education Social Sciences and Humanities (ICESSHum 2019)*, 894–900. Atlantis Press.
- Wibowo, R. A., & Triadi, I. (2025). Fatwa di Era Disrupsi Digital: Studi Tentang Otoritas Agama dan Pengaruh Media Sosial terhadap Penetapan Hukum Islam. *LexIslamica: A Multidisciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 1(3).
- Zuhdi, H. (2026). Reposisi Otoritas Keagamaan TGH Umar Kelayu di Tengah Perubahan Sosial Masyarakat Sasak. *Nagri Pustaka: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sejarah, Dan Budaya*, 4(2), 88–99.
- Zulkarnain, Z., & Hasibuan, R. H. (2025). Peran Pendidikan Tinggi Kader Ulama (PTKU) dalam Optimalisasi Kaderisasi Dai di Kota Binjai. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 448–457.